

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bertutur merupakan aktivitas yang dilakukan manusia setiap hari, baik secara spontan maupun terencana. Pada saat berbicara, seseorang dapat merencanakan tema yang akan disampaikan agar tuturan tersebut bermakna dan memiliki tujuan. Namun, banyak percakapan yang muncul secara refleks berdasarkan situasi yang sedang berlangsung. Dalam ilmu linguistik, terdapat konsep konteks tuturan yang memberikan bobot dan makna pada situasi percakapan yang menjadi bagian dari kajian tindak tutur dalam pragmatik. Komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga memahami dan menafsirkan maksud dibalik setiap kata yang diucapkan (Lasari dan Deden, 2021:490). Sumarlam et al., (2023:29) menyatakan bahwa pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa berdasarkan konteks, baik konteks tuturan maupun situasi. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kajian pragmatik mencakup telaah aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik dengan fokus pada makna tuturan sebagai perwujudan penggunaan bahasa dalam konteks yang sesungguhnya. Dalam pragmatik, terdapat fenomena kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa. Kedua fenomena tersebut merupakan kajian tentang perilaku berbahasa yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma dan tatanan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Putri dan Deden (2021:507) berpendapat bahwa kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek paling penting dalam proses penyampaian informasi. Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, seseorang harus mematuhi norma-norma masyarakat yang telah disepakati bersama. Pada saat seseorang tidak berbicara dengan santun, ia dapat dianggap tidak berbudi karena kesantunan dalam bersikap dan bertutur menjadi tolak ukur utama untuk menilai tingkat keberbudayaan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari cara ia bertutur dan berinteraksi dengan orang lain. Fraser (dalam Santoso, 2020:507) mendefinisikan kesantunan sebagai sifat yang tidak melampaui hak seseorang maupun mengabaikan kewajiban

yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kesantunan tidak hanya berkaitan dengan norma sosial, tetapi juga mencerminkan karakteristik ujaran yang membuat pendengar merasa bahwa penutur tidak melampaui haknya atau mengabaikan tanggung jawabnya.

Nadila (2022:47) menyatakan bahwa kesantunan berbahasa sebagai wujud kesopanan merupakan salah satu kunci pokok dalam berkomunikasi. Kesalahan dalam memilih cara berkomunikasi atau bahkan dalam memilih kata dapat menimbulkan kebencian atau ketidaksenangan mitra tutur. Oleh karena itu, komunikasi antara penutur dan mitra tutur tidak hanya dituntut untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga harus tetap berkomitmen menjaga keharmonisan hubungan. Berbahasa dengan santun memerlukan perhatian terhadap prinsip-prinsip kesantunan, baik dalam tuturan lisan maupun tulisan, sehingga tuturan yang bersifat kasar dan menyinggung secara berlebihan perlu dihindari.

Selain kesantunan, fenomena ketidaksantunan dalam berbahasa juga menjadi kajian penting dalam pragmatik karena sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara debat politik. Ovielia et al., (2023:1008) menyatakan bahwa ketidaksantunan berbahasa adalah perilaku yang melanggar norma sosial dalam penggunaan bahasa, baik disengaja maupun tidak. Norma sosial ini mencakup penggunaan kata-kata yang tidak sopan, tidak baik dan tidak beretika. Rahardi et al., (2016:95) mengkategorikan ketidaksantunan berbahasa meliputi kesembronoan, bermain-mainkan muka, melecehkan muka, dan menghilangkan muka.

Debat merupakan suatu kegiatan diskusi dan pertukaran pendapat yang melibatkan penyampaian alasan untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Dalam konteks tulisan ini, debat merujuk pada aktivitas bertukar pikiran, gagasan, dan argumentasi secara mendalam dengan fokus pada mempertahankan visi dan misi yang diperdebatkan, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan pandangan, sikap, dan pertimbangan pribadi setiap kandidat (Wulanda, 2021:575).

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti dua kategori dari fenomena ketidaksantunan berbahasa yaitu kategori kesembronoan dan bermain-mainkan muka dalam salah satu debat politik, yaitu debat calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030. Kesembronoan dapat diartikan sebagai perilaku yang menunjukkan ketidakseriusan. Selain itu, perilaku sembrono yang dianggap tidak santun juga ditandai oleh penggunaan bahasa yang mengandung humor atau gurauan (Nababan & Deden, 2021:705). Misalnya, dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh Periode 2025-2030, terdapat tuturan berikut:

*Moderator: “Masih ada pandangan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh belum efektif terlaksana di provinsi Aceh. Pertanyaanya, apa strategi yang akan saudara paslon lakukan agar penerapan syariat Islam efektif dan sesuai dengan ketentuan maqashid syariah atau ketentuan syariah. Waktu yang diberikan untuk paslon nomor urut 2 90 detik. Dimulai saat anda berbicara. Silahkan!”*

*Cagub 02: “Sesuai dengan visi misi kita, kita akan terapkan syariat Islam dari usia dini sampai dewasa. yang kedua, proses belajar Islam dari kampung sampai ke kota-kota bahkan di masjid dan meunasah. Kita akan terapkan Islam yang kaffah. Kemudian, **nyoe i Taufit ka iwö i dayah. Nyoe terserah bak jih eunteuk pu jeut i peugöt atau han jeut i peugöt** (ini si Taufit sudah kembali dari dayah. Ini terserah dia, bisa atau tidak dia merealisasikannya). Terima kasih, pak Wagub silahkan!*

Tuturan di atas menunjukkan kesembronoan subkategori asosiasi dengan gurauan karena calon gubernur 02 berusaha menghubungkan (asosiasi) penerapan syariat Islam dengan pengalaman pribadinya yang pernah menjadi bahan olok-olok netizen atau masyarakat. Sebelumnya, ia pernah berpidato dan salah mengucapkan “*Taufiq wö i dayah*” (yang seharusnya “*Wabillahi taufiq wal hidayah*”). Kesalahan ini, kemudian menjadi viral dan dipertainkan oleh masyarakat. Dalam debat ini, ia kembali mengangkat peristiwa tersebut untuk menanggapi pertanyaan tentang penerapan syariat Islam di Aceh.

Cagub 02 dalam ujaran tersebut menunjukkan sedikit relevansi dengan topik yang dibahas karena ia mengaitkan pendidikan di dayah dengan penerapan syariat

Islam. Cagub 02 menyampaikan pernyataannya dengan cara yang bersifat humor sehingga jawabannya terkesan kurang serius dan tidak fokus pada strategi konkret yang diminta oleh moderator. Ujaran tersebut menunjukkan bahwa kesembronoan dalam debat politik tidak hanya bergantung pada ujaran spontan, tetapi juga pada penggunaan referensi pribadi. Referensi yang tidak tepat tersebut menyebabkan perhatian audiens teralih dari substansi debat.

Selain kesembronoan, bentuk ketidaksantunan lain yang muncul dalam debat yaitu bermain-mainkan muka. Tindakan bermain-mainkan muka termasuk ke dalam kategori ketidaksantunan berbahasa yang biasanya ditandai dengan reaksi kesal dari lawan bicara (Rahardi, 2018). Misalnya, dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh Periode 2025-2030, terdapat tuturan berikut:

*Moderator: Digitalisasi pelayanan publik dianggap lambat di Aceh terutama di daerah-daerah belum terjangkau internet. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon mempercepat strategi digitalisasi dan memastikan seluruh masyarakat Aceh dapat mengaksesnya. Waktu anda 90 detik dimulai saat berbicara. Silahkan!*

*Cagub 01: Terima kasih, yang kita butuhkan hari ini itu masalah infrastruktur. Mengapa kita internet itu susah dijangkau karena infrastrukturnya belum. Selama kita ada otsus kita nggak pernah fokus tentang dunia pendidikan. Ke depan ini yang harus kita bangun, yang dibutuhkan rakyat itu sarana dan prasarana kalau infrastrukturnya nggak ada bagaimana koneksi. Kita ke depan, pemerintah harus hadir apa yang rakyat butuhkan ke dapan, itu yang saya pikir yang perlu kita... apa pikirkan ke depan. Kita harus fokus. Kalaupun kita liat dari sisi anggaran, itu anggaran pendidikan hampir tiap tahun dalam jangkauan 17 tahun ini hampir tiga triliun malah lebih, tapi apa yang ada di masyarakat hari ini? Internet saya belum beres jangan kita bilang yang lain. Justru itu yang harus kita fokus ke depan. Bagaimana konektivitas semua daerah, apakah ke Singkil, ke gayo Lues, ke seumeulu, ini perlu perhatian khusus ke depannya. Terima kasih.*

*Moderator: Baik, baik terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 02 untuk menanggapi dengan durasi 60 detik dimulai dari pada saat anda berbicara!*

*Cawagub 02: Terima kasih, saat ini pun kami telah melakukan hal itu karena kami berada di komisi 1 dengan bermitra Kominfo. Di seluruh penjuru dan pemerintah Indonesia ada kementrian Kominfo. Di Kominfo itu telah disediakan yaitu bakti, di bakti itulah yang akan menyediakan seluruh koneksitas baik signal di pedalaman seperti yang disampaikan tadi di semeulu. Tetapi apa yang menjadi permasalahan saat ini? Karena koneksitas pemerintah saat ini dan komunikasi pemerintah yang ada di Aceh saat ini tidak bagus hubungannya dengan pemerintah pusat. Inilah yang akan kita perbaiki ke depan dengan inilah mungkin, **inilah yang tidak dimiliki oleh paslon nomor 01 dengan koneksi komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat.***

Tuturan di atas menunjukkan fenomena ketidaksantunan berbahasa kategori memainkan muka subkategori meremehkan dengan sinisme. Kategori ini merujuk pada tindakan menyampaikan sindiran atau ejekan secara halus melalui cara berbahasa yang menyiratkan superioritas atau penghinaan terhadap pihak lain. Dalam pernyataannya, cawagub 02 mengatakan, “*inilah yang tidak dimiliki oleh paslon nomor 01*”, setelah menjelaskan keunggulan koneksi pihaknya dengan pemerintah pusat. Pernyataan ini bukan hanya memuat klaim keunggulan, tetapi juga secara implisit menyudutkan lawan dengan nada sinis.

Sinisme muncul karena penekanan pada kekurangan lawan tidak dibarengi dengan argumen substansial atau data konkret, melainkan sekadar penegasan berulang bahwa lawan “tidak memiliki” suatu hal. Dengan begitu, tuturan ini tidak lagi bersifat informatif atau argumentatif, melainkan beralih menjadi bentuk peremehan. Strategi semacam ini, dalam debat politik, sering digunakan untuk memperlemah posisi lawan tanpa menyerang secara langsung, tetapi tetap berpotensi menimbulkan rasa tersinggung atau reaksi emosional. Oleh karena itu, tuturan ini mencerminkan fenomena ketidaksantunan berbahasa yang mengarah pada sinisme dan peremehan yang halus, namun terasa menusuk.

Debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030 diselenggarakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 20 Oktober, 10 November, dan 20 November 2024 dengan menghadirkan dua pasangan calon. Pasangan calon pertama Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi sedangkan pasangan calon kedua Muzakir Manaf dan Fadlullah. Acara debat merupakan siaran resmi yang disiarkan secara langsung melalui beberapa saluran televisi serta platform YouTube. Video siaran langsung debat cagub/cawagub Aceh masih dapat diakses melalui beberapa channel YouTube sampai sekarang salah satunya, yaitu Kompas TV Aceh.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada debat pertama dan kedua yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober dan 10 November 2024. Debat ketiga yang seharusnya dilaksanakan pada 20 November 2024 tidak dianalisis karena jalannya debat terganggu oleh keributan yang terjadi di tengah acara. Insiden tersebut dipicu oleh tindakan sejumlah pendukung paslon nomor urut 02 yang naik ke mimbar saat paslon nomor urut 01 sedang menyampaikan visi dan misi. Keributan ini berawal dari kesalahpahaman pada saat pendukung dari pihak paslon 02 mencurigai penggunaan alat tertentu oleh paslon 01, yang ternyata alat dicurigai tersebut merupakan mikrofon. Situasi ini menyebabkan debat tidak dapat dilanjutkan secara normal karena waktu dari lembaga penyiaran sudah berakhir dan tidak ada debat publik lanjutan sehingga tidak layak dijadikan sumber analisis yang utuh dan valid dalam kajian ini.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, terdapat beberapa alasan peneliti melakukan penelitian ini. *Pertama*, ketidaksantunan merupakan fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat karena kurangnya kesadaran penutur terhadap ketidaksantunan berbahasa. Hanif (2021:35-37) menyatakan saat ini banyak bermunculan fenomena ketidaksantunan berbahasa, penutur sering kali tidak menyadari bahwa mereka bertutur dengan tidak santun. Jika hal ini terus terjadi dalam masyarakat Indonesia, ketidaksantunan berbahasa dapat menjadi sesuatu yang lumrah dan berkembang menjadi kebiasaan. Bahkan, fenomena ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan tanpa disadari dan cenderung melampaui batas. Fenomena ini menyebabkan masyarakat semakin terbiasa dengan

penggunaan diksi atau bahasa yang mengandung strategi ketidaksantunan. Padahal, dalam berkomunikasi setiap peserta seharusnya berusaha untuk saling melindungi muka agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Mirisnya, strategi ketidaksantunan yang sering digunakan oleh penutur sering kali tidak disadari oleh mitra tutur sehingga tanpa sadar mereka telah terkena ancaman atau serangan muka.

*Kedua*, bahasa yang tidak santun sering muncul dalam acara debat. Dalam debat politik fenomena ketidaksantunan berbahasa sering kali terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh para elit politik biasanya kurang memperhatikan prinsip kesantunan dan etika berbahasa dalam berdebat sehingga komunikasi menjadi terganggu karena salah satu pihak yang terlibat merasa disinggung, direndahkan, atau diremehkan (Aziz, 2022:2).

*Ketiga*, masyarakat cenderung menganggap kesembronoan sebagai bagian dari aktivitas manusia yang dilakukan tanpa pemikiran matang. Namun, dalam penelitian ini kesembronoan dikaji dalam konteks bahasa yang tidak santun. Anjani (2023:900) berpendapat bahwa kesembronoan dapat diartikan sebagai sikap yang tidak serius. Perilaku sembrono yang sering dianggap kurang sopan juga dapat ditandai dengan adanya unsur humor atau candaan. Perilaku seperti ini biasanya melibatkan tindakan yang kurang mempertimbangkan konsekuensi atau dampak dari tindakannya, sehingga dapat menimbulkan kesan tidak menghormati situasi atau orang lain. Selain itu, kesembronoan sering kali terjadi dalam situasi informal atau dalam upaya untuk mencairkan suasana, meskipun tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang.

*Keempat*, dalam debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030 ditemukan adanya bentuk ketidaksantunan berbahasa yang termasuk dalam kategori memainkan muka. Ujaran-ujaran yang dilontarkan oleh kandidat debat tidak hanya berisi pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi ajang konfrontasi yang melibatkan serangan terhadap muka atau kehormatan lawan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kategori ini agar dapat memahami secara lebih menyeluruh bagaimana ketidaksantunan berbahasa digunakan dalam dinamika debat politik.

Berdasarkan permasalahan serta paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa Kategori Kesembronoan dan Memainkan Muka dalam Debat Cagub/Cawagub Aceh Periode 2025-2030.” Hal ini penting karena bahasa yang digunakan dalam debat dapat mencerminkan kecermatan, kehati-hatian, dan kedewasaan berpikir seorang kandidat dalam menyampaikan gagasan dan menanggapi lawan debatnya. Dengan memberikan analisis berupa pemahaman tentang bentuk-bentuk kesembronoan dan memainkan muka tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang kajian pragmatik, khususnya dalam memahami fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam ranah politik.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran penutur terhadap ketidaksantunan berbahasa menyebabkan perilaku ini semakin umum dan dapat berkembang menjadi kebiasaan.
2. ketidaksantunan berbahasa dalam debat politik sering kali mengganggu komunikasi karena dapat menyinggung, merendahkan, atau meremehkan pihak lain.

## **1.3 Fokus Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, fokus masalah dalam penelitian ini tentang bentuk-bentuk kesembronoan dan memainkan muka dalam dalam debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa kategori kesembronoan dalam debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030?



2. Bagaimanakah bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa kategori memainkan muka dalam debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa kategori kesembronoan dalam debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa kategori memainkan muka dalam debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa kategori kesembronoan dan memainkan muka dalam debat cagub/cawagub Aceh periode 2025-2030 diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi khususnya dalam kajian pragmatik fenomena ketidaksantunan berbahasa dan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan tentang fenomena ketidaksantunan berbahasa, serta bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan peneliti terkait fenomena ketidaksantunan berbahasa kategori kesembronoan dan memainkan muka baik digunakan untuk diri sendiri maupun secara umum.
- b) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait fenomena ketidaksantunan berbahasa. Namun, dengan kajian yang lebih luas ataupun dengan metode yang berbeda serta juga dengan aspek pengamatan yang berbeda.

- c) Bagi mahasiswa Progam Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan mengenai fenomena ketidaksantunan berbahasa kategori kesembronoan dan memainkan muka sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam perkuliahan.